

Manajemen Administrasi Publik Indonesia dalam Mengoptimalkan Manfaat dan Mengatasi Tantangan IA-CEPA

Arief Prayitno

Universitas Jenderal Achmad Yani

Korespondensi Email: ariefprayitno8668@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran manajemen administrasi publik dalam mengimplementasikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menyelidiki tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan manfaat perjanjian bilateral ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi IA-CEPA memerlukan pendekatan manajemen administrasi publik yang komprehensif, yang mencakup harmonisasi kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif, serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi pembentukan tim koordinasi khusus, pengembangan program pelatihan untuk pejabat daerah, perumusan indikator kinerja yang jelas, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi perjanjian. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran penting manajemen administrasi publik dalam mewujudkan kerja sama ekonomi bilateral yang efektif dan bermanfaat bagi Indonesia.

Kata kunci: IA-CEPA, manajemen administrasi publik, kerja sama ekonomi bilateral, implementasi kebijakan, Indonesia-Australia

Abstract

This study examines the role of public administration management in implementing the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Employing a qualitative approach and descriptive analysis, the research investigates the challenges and opportunities faced by Indonesia in optimizing the benefits of this bilateral agreement. The findings indicate that the implementation of IA-CEPA requires a comprehensive public administration management approach, encompassing policy and regulatory harmonization, human resource capacity enhancement, and strengthening coordination among government agencies. The study also identifies the importance of an inclusive and participatory decision-making process, as well as the development of an effective monitoring and evaluation system. Proposed policy recommendations include the establishment of a special coordination team, development of training programs for regional officials, formulation of clear performance indicators, and utilization of information technology in agreement implementation. This research contributes to a better understanding of the crucial role of public administration management in realizing effective and beneficial bilateral economic cooperation for Indonesia.

Keywords: *IA-CEPA, public administration management, bilateral economic cooperation, policy implementation, Indonesia-Australia*

Pendahuluan

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif ini ditandatangani pada Agustus 2018 setelah melalui proses perundingan yang panjang (BPHN, 2020). IA-CEPA mencakup berbagai aspek seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerjasama ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Australia (FTA Center, 2020). Inisiatif untuk memulai perundingan IA-CEPA sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2005, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Studi Kelayakan Bersama (BPHN, 2020). Studi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Perundingan IA-CEPA secara resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia pada 2 November 2010 (BPHN, 2020). Meskipun sempat terhenti selama tiga tahun setelah putaran perundingan kedua pada Juli 2013, kedua negara sepakat untuk melanjutkan kembali perundingan pada Maret 2016 (BPHN, 2020). Setelah melalui 12 putaran perundingan dan 5 pertemuan tingkat Ketua Perunding, akhirnya kedua negara berhasil menyelesaikan perundingan secara substansial. Pada 31 Agustus 2018, Indonesia dan Australia mengeluarkan pernyataan bersama yang menandakan selesainya proses perundingan, dan akhirnya pada 4 Maret 2019, Persetujuan IA-CEPA ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara di Jakarta (BPHN, 2020).

Signifikansi IA-CEPA bagi Indonesia dan Australia tidak dapat dipandang sebelah mata. Bagi Indonesia, perjanjian ini membuka akses pasar yang lebih luas ke Australia, meningkatkan daya saing produk dan tenaga kerja Indonesia, serta menarik investasi Australia (FTA Center, 2020). Sementara itu, Australia mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar Indonesia, dengan lebih dari 99% ekspor barang Australia ke Indonesia akan bebas bea masuk atau mendapat preferensi tarif yang signifikan (FTA Center, 2020). IA-CEPA juga bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Australia dalam jangka panjang, dengan menggabungkan kekuatan kedua negara untuk membentuk "Economic Powerhouse" di kawasan (FTA Center, 2020).

Dalam konteks perdagangan, IA-CEPA memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua negara. Australia mengeliminasi 6.474 pos tarif (100% dari total pos tarif) sehingga seluruh bea masuk produk Indonesia ke Australia menjadi 0% (FTA Center, 2020). Di sisi lain, Indonesia mengeliminasi 10.229 pos tarif (94,5% total pos tarif) (FTA Center, 2020). Hal ini tentu akan meningkatkan volume perdagangan bilateral antara kedua negara. Selain itu, IA-CEPA juga bertujuan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing bagi produk-produk pertanian, perikanan, industri, dan kehutanan dari kedua negara (FTA Center, 2020).

Salah satu aspek penting dari IA-CEPA adalah peningkatan akses dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Perjanjian ini dapat memfasilitasi Indonesia untuk meningkatkan standar kualitas tenaga kerja bertaraf internasional (FTA Center, 2020). Hal ini sejalan

dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat bersaing di pasar global. Selain itu, IA-CEPA juga bertujuan untuk meningkatkan investasi dua arah antara Indonesia dan Australia (FTA Center, 2020). Indonesia diharapkan dapat menjadi tujuan yang menarik bagi investor-investor Australia di berbagai sektor, sementara investor Indonesia di Australia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menanamkan modalnya.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian, IA-CEPA juga mencakup kerja sama yang lebih luas melalui 'Economic Cooperation' (FTA Center, 2020). Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan perdagangan yang berkelanjutan antara kedua negara. Dalam konteks ini, peran manajemen administrasi publik yang efektif menjadi sangat penting dalam mewujudkan kerjasama IA-CEPA.

Pentingnya manajemen administrasi publik yang efektif dalam implementasi IA-CEPA tidak dapat diabaikan. Manajemen administrasi publik yang efektif mencakup aspek koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan harmonisasi kebijakan serta regulasi (Linardy, Lauwren, Caroline, Dayoh, & Yemima, 2021). Salah satu tantangan utama dalam implementasi IA-CEPA adalah harmonisasi kebijakan dan regulasi nasional dengan komitmen dalam perjanjian tersebut (Linardy, Lauwren, Caroline, Dayoh, & Yemima, 2021). Hal ini mencakup penyesuaian regulasi terkait investasi, perdagangan, dan tenaga kerja.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi aspek krusial dalam manajemen administrasi publik untuk implementasi IA-CEPA. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya untuk dapat bersaing di pasar global dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh IA-CEPA (Linardy, Lauwren, Caroline, Dayoh, & Yemima, 2021). Ini termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan pendidikan vokasi. Dalam konteks ini, IA-CEPA dapat menjadi katalis untuk mendorong reformasi dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

Koordinasi yang efektif antar berbagai lembaga pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi IA-CEPA (Linardy, Lauwren, Caroline, Dayoh, & Yemima, 2021). Manajemen administrasi publik yang baik harus mampu memastikan sinergi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan terkait IA-CEPA di berbagai tingkat pemerintahan. Hal ini mencakup koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar kementerian dan lembaga terkait.

Manajemen informasi dan komunikasi publik juga menjadi aspek penting dalam implementasi IA-CEPA (Linardy, Lauwren, Caroline, Dayoh, & Yemima, 2021). Pemerintah Indonesia perlu mengelola informasi dan komunikasi publik dengan baik untuk memastikan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap IA-CEPA. Ini termasuk sosialisasi manfaat perjanjian dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi potensi dampak negatif. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap implementasi IA-CEPA.

Dalam konteks formulasi kebijakan, manajemen administrasi publik yang efektif harus mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan implementasi IA-CEPA (Linardy, Lauwren, Caroline, Dayoh, & Yemima, 2021). Ini melibatkan analisis mendalam terhadap sektor-sektor prioritas dan penyusunan strategi untuk

memaksimalkan manfaat perjanjian. Proses pengambilan keputusan terkait implementasi IA-CEPA juga harus inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil (Rusmin, Suryadi, & Abdullah, 2021).

Evaluasi dan monitoring kebijakan terkait IA-CEPA juga menjadi bagian integral dari manajemen administrasi publik yang efektif. Diperlukan sistem evaluasi dan monitoring yang komprehensif untuk menilai dampak kebijakan terkait IA-CEPA dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ini mencakup pengembangan indikator kinerja dan mekanisme umpan balik yang berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan implementasi IA-CEPA, beberapa rekomendasi kebijakan perlu dipertimbangkan. Pertama, penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi prioritas utama (Rissy, 2021). Pemerintah perlu memperkuat mekanisme koordinasi untuk memastikan implementasi IA-CEPA yang efektif dan konsisten. Kedua, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi IA-CEPA juga perlu mendapat perhatian (Rissy, 2021). Kapasitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam implementasi IA-CEPA, termasuk dalam hal promosi investasi dan pengembangan sektor unggulan daerah.

Ketiga, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan implementasi IA-CEPA. Pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memantau kemajuan implementasi IA-CEPA dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Terakhir, peningkatan partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil juga perlu didorong untuk memastikan implementasi IA-CEPA yang inklusif dan bermanfaat bagi berbagai lapisan masyarakat (Rusmin, Suryadi, & Abdullah, 2021).

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Australia, IA-CEPA diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara. Perjanjian ini tidak hanya berfokus pada perdagangan dan investasi, tetapi juga mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama ekonomi yang lebih luas (FTA Center, 2020). Dengan demikian, IA-CEPA memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif jangka panjang bagi kedua negara, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam konteks hubungan bilateral yang lebih luas.

Implementasi IA-CEPA juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam kerjasama ekonomi bilateral. Peran pemerintah daerah dalam implementasi IA-CEPA dapat terlihat dari adanya hubungan sister province yang makin erat, seperti antara DKI Jakarta dan New South Wales (Rusmin, Suryadi, & Abdullah, 2021). Kerjasama semacam ini dapat menjawab kebutuhan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda dan berpotensi menghadirkan implementasi kerjasama di berbagai bidang seperti pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, dan keberlanjutan ekonomi.

Dengan demikian, manajemen administrasi publik yang efektif dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan manfaat dan mengatasi tantangan dari implementasi IA-CEPA. Melalui koordinasi yang baik, peningkatan kapasitas, harmonisasi kebijakan, dan pengelolaan informasi yang efektif, Indonesia dapat memaksimalkan potensi kerjasama

ekonomi dengan Australia dan mewujudkan visi bersama sebagai "Economic Powerhouse" di kawasan.

Beranjak dari latar belakang tersebut, penelitian ini pun dibuat untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pendekatan manajemen administrasi publik dapat membantu Indonesia mengoptimalkan manfaat dan mengatasi tantangan dari kerjasama IA-CEPA?

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengkaji fenomena yang menjadi fokus studi. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam menggali makna dan proses secara mendalam, melampaui apa yang dapat diungkap melalui prosedur statistik semata (Soewadji, 2012, p. 51). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami realitas sosial dari sudut pandang partisipan, menganalisis fenomena yang diteliti, dan mengabstraksikan temuan menjadi pemahaman yang lebih luas (Rahmat, 2009).

Secara spesifik, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif fenomena manajemen administrasi publik, dengan fokus pada kerjasama internasional IA-CEPA. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang ada saat ini secara mendalam.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup berbagai dokumen seperti laporan, artikel ilmiah, dan publikasi terkait lainnya (Arikunto, 2006, p. 129). Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga dapat menelusuri perkembangan historis dari fenomena yang diteliti (Bungin, 2008, p. 122).

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Proses analisis melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pengorganisasian data, pemilahan informasi penting, sintesis temuan, hingga penarikan kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena kolaborasi pemerintahan yang menjadi fokus penelitian (Suryabrata, 2010, p. 75).

Melalui analisis deskriptif kualitatif, peneliti berupaya menggambarkan fenomena yang diteliti dengan menggunakan narasi yang kaya dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap nuansa dan kompleksitas dari situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen administrasi publik telah mengalami evolusi signifikan sejak awal abad ke-20, dari model birokrasi tradisional hingga pendekatan yang lebih berorientasi pada kinerja dan hasil. Pada awalnya, administrasi publik dipahami sebagai kepemimpinan publik atas urusan publik yang secara langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan (Shil & Chowdhury, 2023). Konsep ini menekankan pada efisiensi dan ekonomi dalam penyediaan layanan publik, dengan fokus utama pada pengurangan

biaya dan upaya yang diperlukan (Osborne, 2010, p. 415). Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang manajemen administrasi publik berkembang untuk mencakup aspek-aspek yang lebih luas, termasuk responsivitas terhadap kebutuhan sosial, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, serta isu-isu keadilan dan perlakuan yang setara (Osborne, 2010, pp. 420-423).

Pergeseran paradigma dalam manajemen administrasi publik menjadi semakin jelas dengan munculnya New Public Management (NPM) pada tahun 1980-an. NPM dianggap sebagai paradigma paling inovatif dalam administrasi publik, yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari manajemen bisnis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja keseluruhan layanan publik dalam birokrasi modern (Shil & Chowdhury, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan budaya kinerja, mencapai efisiensi biaya, akuntabilitas anggaran, dan orientasi pelanggan dalam penyampaian layanan (Shil & Chowdhury, 2023). NPM juga menekankan pada desentralisasi, pengukuran kinerja profesional, dan pengendalian yang lebih berfokus pada hasil dan output daripada input dan prosedur (Shil & Chowdhury, 2023).

Dalam konteks global, konsep manajemen administrasi publik telah diadopsi secara luas, tidak hanya di negara-negara OECD tetapi juga di banyak negara berkembang. Negara-negara ini berusaha untuk menerapkan teori manajemen yang memperlakukan warga negara sebagai pelanggan dan institusi publik sebagai manajer, guna memfasilitasi korporatisasi, privatisasi, dan komersialisasi (Shil & Chowdhury, 2023). Di Indonesia, misalnya, reformasi sektor publik melibatkan perubahan selektif terhadap model manajemen publik yang mencerminkan prinsip-prinsip NPM (Osborne, 2010, pp. 357-364). Hal ini menunjukkan bahwa konsep manajemen administrasi publik terus berkembang dan beradaptasi dengan konteks lokal dan global.

Teori kebijakan publik dalam konteks hubungan internasional menawarkan perspektif yang unik dalam memahami interaksi antara kebijakan domestik dan hubungan antar negara. Analisis kebijakan luar negeri, sebagai bagian integral dari studi hubungan internasional, melibatkan proses penggunaan berbagai metode penelitian, teknik, dan argumen untuk memproses dan mengidentifikasi masalah kebijakan luar negeri (Hong, 2022). Pendekatan ini mengakui bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya dibentuk oleh faktor-faktor eksternal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika internal suatu negara.

Dalam konteks hubungan internasional, analisis kebijakan publik sering kali berfokus pada evaluasi dampak kebijakan terhadap negara pembuat kebijakan, negara lain, dan sistem internasional secara keseluruhan [3]. Analisis ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tingkat negara hingga tingkat sistem. Pada tingkat negara, analisis berfokus pada dampak positif dan negatif kebijakan terhadap keberadaan dan perkembangan negara sebagai subjek kebijakan luar negeri, termasuk dampaknya terhadap masyarakat, rezim politik, sistem ekonomi, dan identitas nasional (Hong, 2022). Sementara itu, pada tingkat sistem, analisis melihat bagaimana kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi filosofi hubungan internasional, membentuk aliansi baru, atau bahkan mengarah pada kompetisi atau konflik dalam hubungan internasional (Hong, 2022).

Teori kebijakan publik dalam hubungan internasional juga menekankan pentingnya proses formulasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan global. Dalam konteks perjanjian bilateral seperti IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement), misalnya, analisis kebijakan publik melibatkan formulasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perjanjian, proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif, serta evaluasi dan monitoring kebijakan terkait (Hughes, 2003, pp. 71-76). Pendekatan ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk lebih memahami kompleksitas hubungan internasional dan merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan nasional sambil mempertimbangkan implikasi globalnya.

Model kerjasama ekonomi bilateral telah menjadi instrumen penting dalam hubungan internasional kontemporer, menawarkan kerangka kerja yang lebih fokus dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kedua negara dibandingkan dengan perjanjian multilateral (Hughes, 2003, pp. 94-97). Salah satu contoh yang menonjol dari model ini adalah Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), yang menggambarkan kompleksitas dan potensi kerjasama ekonomi bilateral di era modern. IA-CEPA, yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020, merupakan hasil dari komitmen kedua negara selama hampir satu dekade untuk membangun perjanjian bilateral yang komprehensif (Verico, 2020).

Model kerjasama ekonomi bilateral seperti IA-CEPA mencakup berbagai aspek, termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, e-commerce, dan kerjasama ekonomi yang lebih luas (Hughes, 2003, pp. 95-98). Perjanjian semacam ini biasanya melibatkan pengurangan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, dan peningkatan akses pasar di berbagai sektor (FTA Center, 2020). Dalam kasus IA-CEPA, misalnya, Australia mengeliminasi 6.474 pos tarif (100% dari total pos tarif) sehingga seluruh bea masuk produk Indonesia ke Australia menjadi 0%, sementara Indonesia mengeliminasi 10.229 pos tarif (94,5% total pos tarif) (FTA Center, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa model kerjasama ekonomi bilateral dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua negara mitra.

Keunggulan model kerjasama ekonomi bilateral terletak pada fleksibilitasnya dalam mengakomodasi kepentingan spesifik kedua negara. Dalam konteks IA-CEPA, perjanjian ini tidak hanya berfokus pada perdagangan dan investasi, tetapi juga mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama ekonomi yang lebih luas (Hughes, 2003, pp. 149-153). Hal ini memungkinkan kedua negara untuk memanfaatkan kekuatan komplementer mereka dan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Misalnya, Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian ini untuk meningkatkan produktivitas manufaktur, sementara Australia dapat memperoleh manfaat dari hubungan "sunrise to sunset" (Verico, 2020).

Model kerjasama ekonomi bilateral juga memungkinkan negara-negara untuk mengatasi tantangan spesifik dalam hubungan ekonomi mereka. Dalam kasus IA-CEPA, perjanjian ini bertujuan untuk mengatasi defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Australia dan meningkatkan daya saing produk serta tenaga kerja Indonesia (Hughes, 2003, pp. 72-78). Selain itu, model ini juga dapat mendorong peningkatan investasi dua arah, seperti yang diharapkan dalam IA-CEPA, di mana Indonesia dapat menjadi tujuan

yang menarik bagi investor Australia di berbagai sektor, sementara investor Indonesia di Australia akan mendapatkan kemudahan dalam menanamkan modalnya (Hughes, 2003, pp. 150-157).

Implementasi model kerjasama ekonomi bilateral seperti IA-CEPA memerlukan manajemen administrasi publik yang efektif. Hal ini mencakup harmonisasi kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah (Rusmin, Suryadi, & Abdullah, 2021). Tantangan-tantangan ini menekankan pentingnya pendekatan manajemen administrasi publik yang holistik dan responsif dalam konteks kerjasama ekonomi internasional. Misalnya, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan implementasi perjanjian, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, dan membangun sistem evaluasi dan monitoring yang efektif (Rissy, 2021).

Dalam konteks yang lebih luas, model kerjasama ekonomi bilateral seperti IA-CEPA juga memiliki implikasi penting bagi hubungan internasional. Perjanjian semacam ini dapat memperkuat hubungan bilateral antara negara-negara mitra, meningkatkan posisi mereka di kawasan, dan bahkan mempengaruhi dinamika geopolitik yang lebih luas (Hughes, 2003, pp. 202-212). Oleh karena itu, analisis kebijakan publik dalam implementasi perjanjian bilateral perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga implikasi diplomatik dan strategis yang lebih luas.

Efektivitas model kerjasama ekonomi bilateral sangat bergantung pada kapasitas manajemen administrasi publik kedua negara mitra. Dalam konteks IA-CEPA, misalnya, kedua negara perlu mengembangkan strategi manajemen administrasi publik yang dapat mengatasi tantangan implementasi perjanjian (Osborne, 2010, pp. 374-378). Ini melibatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pengembangan kapasitas institusional, peningkatan kualitas layanan publik, dan implementasi e-government dan digitalisasi (Hughes, 2003, pp. 167-172). Pendekatan ini mencerminkan evolusi konsep manajemen administrasi publik dari model tradisional ke pendekatan yang lebih berorientasi pada kinerja dan hasil.

Penting untuk dicatat bahwa model kerjasama ekonomi bilateral seperti IA-CEPA tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Perjanjian ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam kerjasama ekonomi bilateral, misalnya melalui hubungan sister province yang makin erat (Osborne, 2010, pp. 132-137). Hal ini menekankan pentingnya desentralisasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam konteks manajemen administrasi publik untuk implementasi perjanjian internasional.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, model kerjasama ekonomi bilateral juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek baru seperti e-commerce dan ekonomi digital. IA-CEPA, misalnya, mencakup ketentuan tentang e-commerce yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan digital antara kedua negara (Osborne, 2010, pp. 210-217). Hal ini menuntut pendekatan manajemen administrasi publik yang inovatif dan adaptif, yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi perjanjian.

Evaluasi dan monitoring menjadi komponen kunci dalam implementasi model kerjasama ekonomi bilateral. Dalam konteks IA-CEPA, misalnya, diperlukan sistem

evaluasi dan monitoring yang efektif untuk menilai dampak kebijakan terkait perjanjian dan melakukan penyesuaian yang diperlukan (Osborne, 2010, pp. 172-174). Hal ini mencerminkan pergeseran dalam manajemen administrasi publik dari fokus pada input dan prosedur ke penekanan yang lebih besar pada output dan hasil (Shil & Chowdhury, 2023). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk secara berkelanjutan menilai efektivitas perjanjian dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Akhirnya, penting untuk diingat bahwa model kerjasama ekonomi bilateral seperti IA-CEPA bukan hanya tentang manfaat ekonomi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih kuat antara negara-negara mitra. Perjanjian semacam ini dapat menjadi katalis untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk pendidikan, penelitian, dan pertukaran budaya (Hughes, 2003, pp. 183-201). Oleh karena itu, manajemen administrasi publik dalam konteks ini perlu mempertimbangkan aspek-aspek non-ekonomi dari kerjasama bilateral dan mengembangkan pendekatan yang holistik untuk memaksimalkan manfaat perjanjian bagi kedua negara.

Tantangan Manajemen Administrasi Publik Indonesia dalam Konteks IA-CEPA

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) membuka babak baru dalam hubungan ekonomi bilateral antara kedua negara. Perjanjian yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020 ini mencakup kerangka kerja untuk membuka kemitraan ekonomi bilateral yang lebih luas, serta mendorong kerja sama ekonomi antar pelaku usaha, masyarakat dan individu (Rusmin, Suryadi, & Abdullah, 2021). Namun, implementasi IA-CEPA juga menghadirkan sejumlah tantangan bagi manajemen administrasi publik Indonesia, terutama dalam hal harmonisasi kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga pemerintah.

Harmonisasi kebijakan dan regulasi menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi IA-CEPA. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan substansi IA-CEPA agar tidak terjadi konflik hukum yang merugikan kepentingan nasional dan ekonomi Indonesia (Khairunnissa, 2024). Proses harmonisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan investasi, perdagangan barang dan jasa, hingga regulasi terkait e-commerce dan perlindungan kekayaan intelektual. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada penyesuaian regulasi yang ada, tetapi juga mencakup pembuatan regulasi baru yang selaras dengan komitmen dalam IA-CEPA.

Salah satu aspek krusial dalam harmonisasi kebijakan adalah penyesuaian regulasi terkait investasi. IA-CEPA memberikan perlindungan investasi yang lebih baik, sehingga dapat menambah masuknya investor Australia ke Indonesia khususnya di sektor pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, kesehatan, industri, konstruksi, energi, pertambangan, dan pariwisata (Khairunnissa, 2024). Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini, Indonesia perlu memastikan bahwa regulasi investasinya tidak hanya menarik bagi investor asing, tetapi juga melindungi kepentingan nasional.

Tantangan berikutnya dalam konteks manajemen administrasi publik adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. IA-CEPA membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui program

peningkatan keterampilan dan pendidikan vokasi (Linardy, Lauwren, Caroline, Dayoh, & Yemima, 2021). Perjanjian ini menyediakan 200 visa magang di sembilan profesi di sektor prioritas, termasuk pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, pengembangan infrastruktur, kesehatan, energi, pertambangan, jasa keuangan, dan teknologi informasi dan komunikasi (Shil & Chowdhury, 2023). Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini secara optimal.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan strategi komprehensif dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pengembangan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta peningkatan kemampuan bahasa Inggris tenaga kerja Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa program pertukaran keterampilan timbal balik dan pelatihan kerja di tempat kerja yang disediakan oleh IA-CEPA dapat dimanfaatkan secara maksimal (Nuranisa & Paksi, 2022).

Koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi IA-CEPA. Mengingat luasnya cakupan perjanjian ini, diperlukan koordinasi yang erat antar berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Tantangan ini mencakup koordinasi dalam perumusan kebijakan, implementasi program, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan IA-CEPA. Kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan tumpang tindih kebijakan, inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta hambatan dalam implementasi perjanjian.

Untuk mengatasi tantangan koordinasi ini, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif antar kementerian dan lembaga terkait. Hal ini dapat mencakup pembentukan tim koordinasi khusus untuk implementasi IA-CEPA, pengembangan sistem informasi terpadu, serta penyelenggaraan pertemuan rutin antar lembaga untuk membahas perkembangan dan tantangan dalam implementasi perjanjian. Selain itu, penting juga untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses koordinasi, mengingat peran penting mereka dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah manajemen informasi dan komunikasi publik. Pemerintah Indonesia perlu mengelola informasi dan komunikasi publik dengan baik untuk memastikan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap IA-CEPA (Rissy, 2021). Hal ini mencakup sosialisasi manfaat perjanjian dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi potensi dampak negatif. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap implementasi IA-CEPA.

Dalam konteks formulasi kebijakan, manajemen administrasi publik yang efektif harus mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan implementasi IA-CEPA (Rissy, 2021). Ini melibatkan analisis mendalam terhadap sektor-sektor prioritas dan penyusunan strategi untuk memaksimalkan manfaat perjanjian. Proses pengambilan keputusan terkait implementasi IA-CEPA juga harus inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil (Rissy, 2021).

Evaluasi dan monitoring kebijakan terkait IA-CEPA juga menjadi bagian integral dari manajemen administrasi publik yang efektif (Rissy, 2021). Diperlukan sistem evaluasi dan monitoring yang komprehensif untuk menilai dampak kebijakan terkait IA-CEPA dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ini mencakup pengembangan indikator kinerja dan mekanisme umpan balik yang berkelanjutan.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa tantangan-tantangan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah daerah. IA-CEPA membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam kerjasama ekonomi bilateral, misalnya melalui hubungan sister province yang makin erat (Rissy, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi IA-CEPA juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari IA-CEPA dan mewujudkan visi bersama dengan Australia sebagai "Economic Powerhouse" di kawasan. Manajemen administrasi publik yang efektif dan responsif akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari implementasi perjanjian ini.

Analisis Kebijakan Publik dalam Implementasi IA-CEPA

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif ini, yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020, mencakup kerangka kerja untuk membuka kemitraan ekonomi bilateral yang lebih luas, serta mendorong kerja sama ekonomi antar pelaku usaha, masyarakat dan individu (Rusmin, Suryadi, & Abdullah, 2021). Implementasi IA-CEPA memerlukan analisis kebijakan publik yang cermat untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari perjanjian ini sambil mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul.

Formulasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan IA-CEPA menjadi langkah awal yang krusial dalam proses implementasi. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya selaras dengan komitmen dalam perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan nasional dan potensi dampak terhadap berbagai sektor ekonomi. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan substansi IA-CEPA (Rissy, 2021). Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik hukum nasional dengan substansi Perjanjian IA-CEPA dan memastikan implementasi yang efektif.

Dalam konteks formulasi kebijakan, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang diatur dalam IA-CEPA, termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, e-commerce, dan kerjasama ekonomi yang lebih luas (Khairunnissa, 2024). Misalnya, dalam hal kebijakan lokalisasi data, Indonesia perlu memformulasikan kebijakan yang sejalan dengan komitmen dalam IA-CEPA. Berdasarkan Pasal 13.12 IA-CEPA, Indonesia tidak boleh mensyaratkan suatu pihak Australia untuk menggunakan atau menempatkan fasilitas komputasi di Indonesia sebagai suatu syarat untuk menjalankan usaha di Indonesia, kecuali jika tindakan tersebut telah dilakukan pada tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini (Shil & Chowdhury, 2023).

Formulasi kebijakan yang responsif juga harus mempertimbangkan potensi manfaat dan tantangan bagi Indonesia. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini ialah besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia (Rissy, 2021). Oleh karena itu, kebijakan yang diformulasikan harus mampu mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Australia dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Australia. Ini dapat melibatkan kebijakan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, meningkatkan kualitas produk, dan memfasilitasi akses pasar bagi eksportir Indonesia.

Proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif menjadi kunci dalam implementasi IA-CEPA yang efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting mengingat cakupan IA-CEPA yang luas dan dampaknya yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi dan masyarakat.

Dalam konteks IA-CEPA, proses pengambilan keputusan yang inklusif dapat melibatkan konsultasi publik, dialog dengan asosiasi industri, dan kerjasama antar kementerian dan lembaga pemerintah. Misalnya, dalam Pertemuan The 1st Joint Committee Meeting (JCM) IA-CEPA yang berlangsung secara virtual pada 25 Agustus 2021, delegasi Indonesia tidak hanya terdiri dari perwakilan Kementerian Perdagangan, tetapi juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM dan Bappenas (Kemendag RI, 2021). Ini menunjukkan pendekatan lintas sektoral dalam pengambilan keputusan terkait implementasi IA-CEPA.

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dapat membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasi IA-CEPA secara lebih komprehensif. Misalnya, keterlibatan sektor swasta dapat memberikan wawasan tentang hambatan praktis yang dihadapi dalam memanfaatkan peluang yang dibuka oleh IA-CEPA, sementara partisipasi pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi potensi pengembangan ekonomi lokal melalui kerjasama bilateral.

Proses pengambilan keputusan yang inklusif juga harus mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses pengambilan keputusan dan hasil-hasilnya harus dapat diakses oleh publik, memungkinkan adanya pengawasan dan umpan balik dari masyarakat. Ini dapat membantu membangun dukungan publik terhadap implementasi IA-CEPA dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan berbagai pihak (Nuranisa & Paksi, 2022).

Evaluasi dan monitoring kebijakan terkait IA-CEPA merupakan komponen penting dalam siklus kebijakan publik. Proses ini memungkinkan pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dalam konteks IA-CEPA, evaluasi dan monitoring menjadi semakin penting mengingat kompleksitas perjanjian dan potensi dampaknya yang luas terhadap ekonomi Indonesia (Rusmin, Suryadi, & Abdullah, 2021).

Salah satu aspek penting dalam evaluasi dan monitoring adalah pengembangan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Ini dapat mencakup indikator-indikator seperti pertumbuhan ekspor ke Australia, peningkatan investasi Australia di Indonesia,

perkembangan sektor-sektor prioritas, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengembangan indikator ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan berbagai aspek dan tujuan dari IA-CEPA.

Proses evaluasi dan monitoring juga harus mempertimbangkan tantangan-tantangan dalam implementasi IA-CEPA. Misalnya, pada tahun pertama implementasi, IA-CEPA terpengaruh oleh pandemi Covid-19, terutama dalam hal perdagangan barang dan jasa, meskipun investasi tetap stabil (Kemendag RI, 2021). Evaluasi yang cermat terhadap dampak pandemi dan faktor-faktor eksternal lainnya dapat membantu dalam merancang strategi adaptasi dan mitigasi risiko.

Monitoring implementasi IA-CEPA juga melibatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia. Pertemuan Joint Committee Meeting (JCM) IA-CEPA, misalnya, membahas evaluasi dan monitoring atas implementasi IA-CEPA terkait komitmen kedua negara dalam perdagangan barang, jasa dan investasi, serta kerja sama ekonomi (Rusmin, Suryadi, & Abdullah, 2021). Forum semacam ini memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk menilai kemajuan implementasi, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan solusi bersama.

Dalam proses evaluasi dan monitoring, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari implementasi IA-CEPA. Ini dapat mencakup penilaian terhadap dampak perjanjian pada kesempatan kerja, pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan holistik semacam ini dapat membantu memastikan bahwa implementasi IA-CEPA berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Indonesia (Nuranisa & Paksi, 2022).

Evaluasi dan monitoring yang efektif juga memerlukan sistem pengumpulan dan analisis data yang kuat. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kapasitas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data terkait implementasi IA-CEPA. Ini dapat melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengumpulan data real-time dan analisis yang lebih cepat dan akurat.

Hasil dari proses evaluasi dan monitoring harus digunakan untuk menginformasikan penyesuaian kebijakan dan strategi implementasi IA-CEPA. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa sektor tertentu menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan peluang yang dibuka oleh IA-CEPA, pemerintah dapat merancang program dukungan khusus atau melakukan negosiasi ulang aspek-aspek tertentu dari perjanjian.

Akhirnya, penting untuk memastikan bahwa proses analisis kebijakan publik dalam implementasi IA-CEPA bersifat dinamis dan adaptif. Lingkungan ekonomi global yang terus berubah, perkembangan teknologi, dan perubahan prioritas nasional memerlukan pendekatan kebijakan yang fleksibel dan responsif. Dengan demikian, formulasi kebijakan yang responsif, proses pengambilan keputusan yang inklusif, serta evaluasi dan monitoring yang efektif harus menjadi siklus yang berkelanjutan dalam implementasi IA-CEPA.

Rekomendasi Kebijakan

Implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memaksimalkan manfaatnya bagi Indonesia. Penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi langkah awal yang krusial dalam mewujudkan implementasi IA-CEPA yang efektif. Mengingat luasnya cakupan perjanjian ini, diperlukan sinergi yang erat antar berbagai kementerian dan lembaga pemerintah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya (Hughes, 2003). Pembentukan tim koordinasi khusus untuk implementasi IA-CEPA dapat menjadi solusi untuk memastikan adanya komunikasi yang lancar dan pengambilan keputusan yang tepat antar lembaga terkait.

Sistem informasi terpadu perlu dikembangkan untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam implementasi IA-CEPA. Hal ini akan memungkinkan pemantauan real-time terhadap perkembangan implementasi perjanjian dan memudahkan identifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus. Penyelenggaraan pertemuan rutin antar lembaga, seperti Joint Committee Meeting (JCM) IA-CEPA, juga penting untuk membahas perkembangan dan tantangan dalam implementasi perjanjian (Kemendag RI, 2021). Forum semacam ini memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk menilai kemajuan implementasi, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan solusi bersama.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi IA-CEPA menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. IA-CEPA membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam kerjasama ekonomi bilateral, misalnya melalui hubungan sister province yang makin erat (Saepudin, Ibrahim, Putri, & Amira, 2024). Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dan panduan kepada pemerintah daerah dalam memahami dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh IA-CEPA. Program pelatihan dan workshop dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman pejabat daerah tentang isi perjanjian dan cara-cara untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi daerah masing-masing.

Kerjasama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah lokal di Australia perlu didorong untuk meningkatkan kesempatan perdagangan dan investasi. Contoh yang baik adalah kerjasama sister province antara DKI Jakarta dan New South Wales, yang telah berlangsung sejak 1994 (Saepudin, Ibrahim, Putri, & Amira, 2024). Pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembentukan kerjasama serupa antara daerah-daerah lain di Indonesia dengan mitra di Australia, dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif menjadi kunci untuk memastikan implementasi IA-CEPA berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemerintah perlu mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan (Hughes, 2003). Indikator-indikator ini dapat mencakup pertumbuhan ekspor ke Australia, peningkatan investasi Australia di Indonesia, perkembangan sektor-sektor prioritas, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sistem monitoring dan evaluasi yang dikembangkan harus mampu mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi IA-CEPA dan memberikan masukan untuk penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Misalnya, pada tahun pertama implementasi, IA-CEPA terpengaruh oleh pandemi Covid-19, terutama dalam hal perdagangan barang dan jasa, meskipun investasi tetap stabil (Kemendag RI, 2021). Evaluasi yang cermat terhadap dampak pandemi dan faktor-faktor eksternal lainnya dapat membantu dalam merancang strategi adaptasi dan mitigasi risiko.

Peningkatan partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil dalam implementasi IA-CEPA perlu didorong untuk memastikan bahwa manfaat perjanjian dapat dirasakan secara luas. Pemerintah dapat mengembangkan program-program yang memfasilitasi keterlibatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh IA-CEPA (Saepudin, Ibrahim, Putri, & Amira, 2024). Ini dapat mencakup program pelatihan tentang standar ekspor, fasilitasi akses ke pasar Australia, dan dukungan dalam mengembangkan jaringan bisnis dengan mitra di Australia.

Kerjasama antara sektor swasta Indonesia dan Australia perlu diperkuat, terutama dalam bidang-bidang prioritas seperti pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, kesehatan, industri, konstruksi, energi, pertambangan, jasa keuangan, dan pariwisata (Rokom, 2021). Pemerintah dapat memfasilitasi forum-forum bisnis bilateral untuk mempertemukan pelaku usaha dari kedua negara dan mendorong terbentuknya kemitraan strategis.

Keterlibatan masyarakat sipil, termasuk akademisi dan lembaga penelitian, juga penting dalam proses implementasi IA-CEPA. Mereka dapat berperan dalam melakukan kajian independen tentang dampak perjanjian, memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan, dan membantu dalam sosialisasi manfaat IA-CEPA kepada masyarakat luas. Kolaborasi antara universitas di Indonesia dan Australia dalam program pertukaran pelajar dan penelitian bersama perlu didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia (Saepudin, Ibrahim, Putri, & Amira, 2024).

Manajemen informasi dan komunikasi publik yang efektif menjadi aspek penting dalam membangun dukungan masyarakat terhadap implementasi IA-CEPA. Pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi yang komprehensif untuk mensosialisasikan manfaat perjanjian dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi potensi dampak negatif (Hughes, 2003, pp. 97-111). Informasi tentang peluang yang dibuka oleh IA-CEPA, seperti akses pasar yang lebih luas ke Australia dan peningkatan investasi, perlu dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada berbagai pemangku kepentingan.

Transparansi dalam proses implementasi IA-CEPA juga perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat mengembangkan platform online yang menyediakan informasi terkini tentang perkembangan implementasi perjanjian, termasuk data statistik perdagangan dan investasi, serta laporan evaluasi berkala. Ini akan membantu membangun kepercayaan publik dan memungkinkan pemantauan yang lebih baik oleh berbagai pihak (Osborne, 2010, pp. 212-222).

Program sosialisasi dan edukasi publik tentang IA-CEPA perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ini dapat mencakup seminar, workshop, dan kampanye media sosial yang ditargetkan pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Penting untuk menyampaikan tidak hanya manfaat ekonomi

dari IA-CEPA, tetapi juga potensinya dalam memperkuat hubungan people-to-people antara Indonesia dan Australia (Khairunnissa, 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi IA-CEPA juga perlu ditingkatkan. Pengembangan platform digital untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi antara kedua negara dapat membantu mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, sistem perizinan online terpadu untuk investasi Australia di Indonesia dapat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi (Rusmin, Suryadi, & Abdullah, 2021).

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, program-program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang disediakan melalui IA-CEPA perlu dipromosikan secara luas. Informasi tentang 200 visa magang di sembilan profesi di sektor prioritas, termasuk pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, pengembangan infrastruktur, kesehatan, energi, pertambangan, jasa keuangan, dan teknologi informasi dan komunikasi, harus dikomunikasikan dengan baik kepada calon peserta yang potensial (Rokom, 2021).

Penting untuk memastikan bahwa implementasi IA-CEPA tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Komunikasi publik harus mencakup informasi tentang bagaimana perjanjian ini dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Indonesia, termasuk dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 (Nuranisa & Paksi, 2022). Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam implementasi IA-CEPA, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari perjanjian ini dan memperkuat posisinya sebagai mitra strategis Australia di kawasan.

Kesimpulan

Manajemen administrasi publik memainkan peran krusial dalam implementasi IA-CEPA yang efektif. Perjanjian ini membuka peluang signifikan bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar ke Australia, meningkatkan investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi harmonisasi kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi antar lembaga pemerintah. Untuk mengoptimalkan manfaat IA-CEPA, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi langkah awal yang penting, diikuti dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi perjanjian. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai tujuan. Partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat sipil perlu didorong untuk memastikan manfaat perjanjian dapat dirasakan secara luas. Manajemen informasi dan komunikasi publik yang efektif juga menjadi kunci dalam membangun dukungan masyarakat. Dengan pendekatan manajemen administrasi publik yang efektif dan responsif, Indonesia dapat memaksimalkan potensi kerjasama ekonomi dengan Australia dan mewujudkan visi bersama sebagai "Economic Powerhouse" di kawasan.

Untuk mengoptimalkan implementasi IA-CEPA, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, pembentukan tim koordinasi khusus lintas kementerian dan lembaga untuk menangani implementasi IA-CEPA. Tim ini harus didukung oleh sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real-time. Kedua, pengembangan program pelatihan komprehensif bagi pejabat pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang IA-CEPA dan cara memanfaatkan peluangnya. Ketiga, penyusunan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas implementasi perjanjian. Keempat, pembentukan forum konsultasi rutin yang melibatkan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang inklusif. Kelima, pengembangan strategi komunikasi publik yang komprehensif untuk mensosialisasikan manfaat IA-CEPA dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi potensi dampak negatif. Keenam, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, seperti pengembangan platform digital terpadu. Terakhir, perlu dilakukan kajian berkala tentang dampak sosial dan lingkungan dari implementasi IA-CEPA untuk memastikan perjanjian ini berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Referensi

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPHN. (2020). *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia*. Retrieved from bphn.go.id:
<https://bphn.go.id/data/documents/iacepa.pdf>
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- FTA Center. (2020, Juli 5). *IA-CEPA*. Retrieved from [kemendag.go.id](https://ftacenter.kemendag.go.id/ia-cepa):
<https://ftacenter.kemendag.go.id/ia-cepa>
- Hong, L. T. (2022). Foreign Policy Analysis - An Approach from Policy Theory. *Migration Letters*, Vol. 19, No. S2, 1656-1665.
- Hughes, O. E. (2003). *Public Management and Administration*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kemendag RI. (2021, Agustus 25). *Pertemuan Joint Committee Meeting (JCM) IA-CEPA*. Retrieved from [kemendag.go.id](https://www.kemendag.go.id):
<https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-joint-committee-meeting-jcm-ia-cepa>
- Khairunnissa, S. (2024). Analisis Perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, Vol. 7, No. 3, 213-231.
- Linardy, G., Lauwren, J., Caroline, T., Dayoh, J. F., & Yemima, R. I. (2021). Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA. *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi*, 252-269.
- Nuranisa, S. A., & Paksi, A. K. (2022). Peran Strategis Kerjasama IA-CEPA Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 192-202.

- Osborne, S. P. (2010). Conclusions: Public Governance and Public Services Delivery: A Research Agenda for the Future. In S. P. Osborne, *The New Public Governance? Emerging Perspectives on The Theory and Practice of Public Governance* (pp. 413-428). Abingdon, England: Routledge.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5(9), 1-8.
- Rissy, Y. Y. (2021). Tantangan dan Strategi Pelaksanaan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). *Refleksi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 179-198.
- Rokom. (2021, Januari 20). *Kemenkes Dorong Pemanfaatan Implementasi Perjanjian Perdagangan Indonesia-Australia: UU 1 Tahun 2020*. Retrieved from kemkes.go.id: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200831/1934767/kemenkes-dorong-pemanfaatan-implementasi-perjanjian-perdagangan-indonesia-australia-uu-1-tahun-2020/>
- Rusmin, J. H., Suryadi, A., & Abdullah, N. (2021). Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-2018. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 1, No. 2, 2775-3336.
- Saepudin, Ibrahim, B., Putri, D. M., & Amira, N. S. (2024). Kerja Sama Jakarta-New South Wales dalam Kerangka Paradiplomasi melalui IA-CEPA. *Mondial*, Vol. 1, No. 2, 141-168.
- Shil, N. C., & Chowdhury, A. (2023). Public Administration Agendas in the Light of New Public Management: A Written Testimony of Reform Initiatives of An Asian Country. *Journal of Public Administration and Government*, Vol. 5, No. 2, 143-160.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suryabrata, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Verico, K. (2020). *How to Measure Bilateral Economic Relations? Case of Indonesia-Australia*. Institute for Economic and Social Research.